



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. CaLK.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.939.451.004.378,32
b. Belanja dan Transfer	Rp	3.653.938.156.214,07
Surplus/defisit	Rp	285.512.848.164,25
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	119.853.403.898,32
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	119.853.403.898,32

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) :		
Surplus/defisit	Rp	285.512.848.164,25
Pembiayaan Netto	Rp	<u>119.853.403.898,32</u>
	Rp	405.366.252.062,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 225.464.659.254,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.713.986.345.124,00
 - b. Realisasi Rp 3.939.451.004.378,32
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 225.464.659.254,32
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan Transfer sejumlah Rp (179.810.641.214,93) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 3.833.748.797.429,00
 - Realisasi Rp 3.653.938.156.214,07
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (179.810.641.214,93)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (405.275.300.469,25) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (119.762.452.305,00)
 - b. Realisasi Rp 285.512.848.164,25
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (405.275.300.469,25)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 90.951.593,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 119.762.452.305,00
 - b. Realisasi Rp 119.853.403.898,32
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 90.951.593,32
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (90.951.593,32) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 119.762.452.305,00
 - b. Realisasi Rp 119.853.403.898,32
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (90.951.593,32)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 adalah:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	119.762.452.305,32
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	<u>119.762.452.305,32</u>
Sub Total	Rp	0,00

b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	405.366.252.062,57
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	405.366.252.062,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 adalah:

a. Jumlah aset	Rp	6.455.425.309.097,81
b. Jumlah kewajiban	Rp	417.140.756.099,65
c. Jumlah ekuitas	Rp	6.038.284.552.998,16

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	4.147.650.140.260,09
b. Beban	Rp	<u>3.760.720.227.910,23</u>
Surplus/defisit Kegiatan Operasional	Rp	386.929.912.349,86
c. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
d. Surplus/defisit Pos Luar Biasa	Rp	<u>0,00</u>
Surplus/defisit-LO	Rp	386.929.912.349,86

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2019	Rp	108.847.425.125,02
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	912.657.525.504,39
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(632.297.957.188,34)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	90.951.593,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	143.662.392,31
f. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	9.302.500,00
g. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	4.000.000,00
h. Saldo akhir kas di BLUD	Rp	13.087.038.428,54
i. Saldo akhir kas di Bendahara BOS	Rp	2.437.710.124,61
j. Saldo akhir kas lainnya	Rp	4.030.685,00
k. Saldo akhir kas per 31 Desember 2019	Rp	404.983.689.164,52

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	5.613.974.371.943,44
Surplus/Defisit-LO	Rp	386.929.912.349,86
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	37.380.268.704,86
Ekuitas Akhir	Rp	6.038.284.552.998,16

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2020

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

T. S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1-152/2020